

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan pondasi awal untuk membuat rencana tata ruang wilayah sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang yang berguna sebagai alat untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lingkungan. Kenyataannya dalam hal ini daerah Sumedang yang menjadi kajian penulis tidak menggunakan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dasar untuk membuat rencana tata ruang wilayah, maka oleh sebab itu rencana tata ruang wilayah daerah Sumedang merusak lingkungannya sendiri juga daerah kabupaten Bandung.
2. Peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana tata ruang wilayah sebagai penunjang tercapainya perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Hal ini dapat terjadi jika badan pengelolaan lingkungan hidup daerah ikut andil baik sebelum dan sesudah rencana tata ruang wilayah di tetapkan.

B. Saran

1. Seharusnya dibentuknya perundang-undangan khusus terkait kajian lingkungan hidup strategis mengingat pentingnya kajian lingkungan hidup strategis sebagai kerangka berpikir dalam perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia. Jika kajian lingkungan hidup diwajibkan maka harus adanya penguatan budaya hukum bagi struktur hukum agar yang dilaksanakan bukan sebatas untuk memenuhi kewajiban tetapi juga memperhatikan pembangunan berkelanjutan dari dampak lingkungan.
2. Dengan peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang sangat penting dalam rencana tata ruang wilayah di harapkan badan pengelolaan lingkungan hidup daerah harus lebih memaksimalkan lagi tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang khususnya dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Dan badan pengelolaan lingkungan hidup daerah juga seharusnya bisa ikut mengawal baik sebelum maupun sesudah rencana tata ruang wilayah ditetapkan agar dampak lingkungan yang terjadi dari pembangunan bisa di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta: 1996 *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2000
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta: 2006
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Jakarta:1978
- Bambang Setyabudi, *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup*, Deputi Bidang Tata Lingkungan, Jakarta : 2007.
- David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global* , Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 1993
- Ernan Rustiadi, dkk. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta : 2009
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit universitas, Jakarta : 1966
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung : 2008
- Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta:2011
- Kaslan A. Thohir, *Butir-Butir Tata Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta:1991
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FHU, Jakarta: 1988
- Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid 1*, Aksara Baru, Jakarta : 1983
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, Pro justitia, Surabaya:1998
- Robin Attfield, *Etika Lingkungan Global* , Kreasi Wacana, Bantul:2010
- Sri Soemantri Martosoeignjo, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung:1992
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2015

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Kabupaten Bandung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sumedang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

C. SUMBER LAIN

Bagir Manan, *Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah Univ.Padjaran, Bandung:1994

<http://chatjinx.blogspot.com/2009/10/jean-jacques-rousseau-teori-kontrak.html>

www.menlh.go.id/pentingnya-penerapan-klhs-diindonesia/

<http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>